

PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SMP BERBASIS PESANTREN PONDOK PESANTREN PANCASILA KOTA BENGKULU

Murniati Pasaribu

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu

Email: murniatips@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah, sebagai penulis tentu mengharapkan penambahan wawasan dan pengetahuan mengenai peran, fungsi, juga melihat sejauh mana penerapan prinsip komite sekolah, dan tujuan dari adanya komite sekolah di SMP Berbasis Pesantren pondok pesantren pancasila kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pendekatan kualitatif atau deskripsi analisis dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah SMP Berbasis Pesantren pondok pesantren pancasila kota Bengkulu. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi pendidikan. Dari hasil penelitian ini komite sekolah SMP Berbasis Pesantren pondok pesantren pancasila kota Bengkulu sudah menjalankan peran dan fungsinya sebagaimana telah disebutkan diatas, walaupun secara keseluruhan belum bisa dikatakan sempurna, akan tetapi telah banyak kontribusi yang telah diberikan komite sekolah dalam hal membantu sekolah, baik secara financial maupun secara sumbang ide dan tenaga. Peran komite sekolah dalam membuat kebijakan meningkatkan mutu pendidikan adalah Mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di SMP BP Pondok Pesantren Pancasila kota Bengkulu, Meningkatkan tanggung jawab atau peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Menciptakan suasana kondusif, transparan, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Kata kunci: Komite Sekolah

ABSTRACT

The objective of this research is, as the writer would expect the addition of insight and knowledge about the role, function, also see the extent of applying the principle of school committee, and the purpose of the existence of school committees in SMP-Based Pesantren pondok pesantren Pancasila Bengkulu city. This research is based on qualitative approach or description of analysis with case study method. The location of the research is SMP Based Pesantren pondok pesantren Pancasila Bengkulu city. Data collection was done by field observation, interview and documentation. Since the introduction of decentralized education system. From the results of this study committee secondary school-based boarding school boarding school Pancasila cities Bengkulu already perform their role and function as mentioned above, even though the overall can not be said to be perfect, but it has many unique contribution that the school committee in terms of helping schools, both financially as well as brainstorming ideas and energy. The role of the school committee in making policies to improve the quality of education is Accommodate, aspirations and community initiatives in the delivery of operational policies and education programs in junior BP Boarding School Pancasila Bengkulu city, increase the responsibilities or the role of the community in education, creating an atmosphere conducive, transparent and democratic in the organization and quality of education services.

Keywords: School Committee

PENDAHULUAN

Persoalan mutu pendidikan masih belum menggemblirakan sejak beberapa dekade belakangan ini. Permasalahan tersebut masih juga diperparah dengan pengelolaan pendidikan yang belum efisien, demokratis, berkeadilan, serta partisipatif. Hal ini terjadi sebagai akibat otonomi pengelolaan pendidikan dan profesional pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang belum sepenuhnya terwujud.

“Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik”. Menurut Tilaar, desentralisasi

pendidikan merupakan suatu keharusan. Menurutnya ada tiga hal yang berkaitan dengan urgensidesentralisasi pendidikan, yaitu (a) pembangunan masyarakat demokrasi, (b) pengembangan sosial kapital, dan (c) peningkatan daya saing bangsa.¹

Desentralisasi pendidikan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola penyelenggaraan pendidikan didaerahnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dijelaskan bahwa

¹H. A. R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta, Rinneka Cipta, 2002), hal. 20.



pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, tujuan dari penyelenggaraan pendidikan nasional adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab.²

Tujuan pokok desentralisasi pendidikan khususnya pada tingkat pesantren mengarahkan dan memberdayakan orang tua untuk bekerja sama yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Peran serta masyarakat melalui komite sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Aspek penting dari peran serta masyarakat melalui komite sekolah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat dan mengetahui arti dan pentingnya keberadaan pesantren bagi santri-santrinya.³

Pembentukan komite sekolah yang telah ditetapkan dalam keputusan menteri pendidikan nasional No.044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, merupakan amanat dari undang-undang No.25 Tahun 2000 tentang program pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 dengan tujuan agar pembentukan Komite sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis Pesantren/masyarakat (school community-based management) Pembentukan komite sekolah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah dituangkan dalam pasal 56 UU NO.20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikannya meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite sekolah.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan, tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
3. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

²Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3.

³Syaiful sagala, Manajemen Berbasis Sekolah Dan Masyarakat, Startegi memenangkan persaingan mutu (Jakarta : Rakasta Samasa, 2000), h.170

Dalam otonomi pendidikan sekarang ini, peran stakeholder akan tersebar kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya ditangan aparat pemerintah pusat. Salah satu model pengelolaan pendidikan yang sedang digagas kementerian pendidikan nasional ada-lah apa yang disebut manajemen berbasis sekolah, yang memberi otonom kepada kemandirian sekolah. Keberhasilan dalam pelaksanaan MBP sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota.⁴

Bantuan yang bersifat kongkrit dari komite sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pondok pesantren akan muncul manakala pihak pondok pesantren mampu melakukan pemberdayaan komite sekolah.

Secara sederhana pemberdayaan dalam ruang lingkup manajemen dapat diartikan sebagai cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari komite sekolah. Pemberdayaan dimaksudkan sebagai keterlibatan komite sekolah untuk bersama-sama mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan di pondok pesantren Pancasila.

Berdasarkan hasil studi awal dapat diketahui bahwa komite pesantren di pondok pesantren sudah berperan, namun masih kurang total. Dan komite sekolah juga sudah ikut serta dalam peningkatan mutu pendidikan, namun ini juga belum nampak jelas keterlibatan penuhnya. Nah, dari itu sangat diharapkan peran aktif dari komite sekolah untuk sama-sama mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan di pondok pesantren Pancasila.⁵

Apalagi pesantren adalah notabene swasta, maka pesantren ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan.

Berdasarkan hasil studi awal di atas, peneliti perlu melakukan penelitian dengan judul Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu pendidikan SMP Berbasis Pesantren di pondok pesantren Pancasila kota Bengkulu”.

Rumusan masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran komite sekolah menetapkan kebijakan di Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu?
2. Bagaimana peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan SMPBP pada Pondok Pesantren Pancasila kota Bengkulu?

⁴Warul Walidin A K, Pencerahan Jurnal Pendidikan, Majlis Pendidikan daerah Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh 2004), hal.2.

⁵Wawancara dengan Ustadz Riki Jhon Indri (Ka. Tata Usaha) di pondok Pancasila pada tanggal 05 Februari 2017.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa peran komite sekolah di Pondok Pesantren Pancasila kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan SMPBP pada Pondok Pesantren Pancasila kota Bengkulu.

Metode penelitian

Peneliti memilih metode kualitatif, metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶

Data kualitatif merupakan sumber dari diskripsi yang luas dan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses – proses yang terjadi dalam lingkup setempat.

LANDASAN TEORI

1. Komite Sekolah

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan sekolah, jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.⁷

Komite Sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah.⁸

Sedangkan menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan Sekolah, maupun jalur pendidikan luar Sekolah. Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.⁹

⁶Lexy Z.Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosda karya, 2000), h.3.

⁷Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2005) h.177.

⁸Mulyono, Manajemen Administrasi & organisasi pendidikan. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media. hal. 258

⁹Permendikbud Republik Indonesia .Undang-undang sisidiknas. Yogyakarta. Buku Biru. 2013, Hal. 70

Dengan kata lain, keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga pemerintah propinsi, kabupaten/kota, dan pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat atau stakeholder pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep partisipasi berbasis masyarakat (community-based participation) dan manajemen berbasis sekolah (school-based management), yang kini tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mulai dilaksanakan di Indonesia.

2. Peran Komite sekolah

Peran serta atau partisipasi komite sekolah mencakup keikutsertaan dalam pengambilan keputusan bidang non-akademik yang dipimpin oleh kepala sekolah.

Lebih lanjut dapat diketahui bahwa peran komite sekolah antara lain :

1. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah.
2. Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
3. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pengeluaran pendidikan (output) di sekolah.
4. Mediator antara sekolah, pemerintah (Eksekutif) dan DPR (Legislatif) dengan masyarakat.
5. Motivator dalam mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
6. Melaksanakan kerja sama dengan masyarakat perorangan/organisasi, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
7. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
8. Mendorong orang tua dan masyarakat dan berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan termasuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan kebutuhan pendidikan.¹⁰

Pemberlakuan manajemen Berbasis sekolah membawa implikasi kepada sekolah tidak menjadi subordinat lagi dari pemerintah maupun yayasan, tetapi bersifat otonom.¹¹

Kondisi inilah yang membuat mutu pendidikan terpuruk atas ulah sebagian dari pembuat kebijakan, karena tidak dilandasi dengan itikad baik, dan kes-

¹⁰ Mawardi Lubis. Disertasi Jakarta UNJ :2013 hal. 52

¹¹ B.Suryosubroto. Manajemen Pendidikan Di sekolah Jakarta Rineka Cipta .hal : 194



unggahan . Padahal di jelaskan dalam Al-qur'an Surat Al-Hajj.77.

Artinya: "Dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan".¹²

Apapun bentuk organisasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sebut saja dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai pengganti BP3 tidak dapat berbuat banyak, sepanjang masih ada oknum-oknum yang tidak bermoral, hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Dijelaskan dalam Al-qur'an Surat Al Mujaadilah ayat 11.

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³

Berdasarkan ayat di atas komite sekolah dan stakeholder yang terkait secara keseluruhan menjalankan usaha-usaha semua yang menyangkut dengan pendidikan.

3. Fungsi Komite Sekolah

Dalam hubungannya dengan community empowering, komite sekolah berfungsi memotivasi tumbuhnya komitmen masyarakat melakukan kerja sama, menampung ide, menggalang dana masyarakat.

Dengan demikian jelas diketahui bahwa peran fungsi (partisipasi) komite sekolah dapat berpengaruh langsung terhadap efektifitas pengelolaan sekolah.¹⁴

4. Kedudukan Komite Sekolah

Komite Sekolah mempunyai acuan dalam pembentukannya menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/2002 Tanggal 2 April 2002, Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Disamping itu Komite sekolah juga merupakan suatu badan atau lembaga non profit dan non politis dibentuk secara demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dan berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan ha-

sil pendidikan. tim pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.¹⁵

5. Manajemen Komite Sekolah

Manajemen yang baik merupakan hal yang esensial bagi semua sumber daya yang ada untuk dapat difungsikan dan memberi pengaruh secara maksimal untuk pencapaian tujuan organisasi pendidikan.¹⁶

Seperti telah disebutkan diatas bahwa komite sekolah memiliki peran sebagai :

- Komite sekolah sebagai badan pendukung (supporting agency).
- Komite sekolah sebagai badan pengawas (controlling agency).
- Komite Pesantren sebagai Bahan Mediator (Mediator Agency)

5. Pemberdayaan Komite Sekolah

Komite sebagai organisasi dan wadah warga masyarakat yang peduli pada pendidikan, memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam memberikan dukungan sehingga proses penyelenggaraan sekolah berjalan dalam mencapai tujuan. Dalam kaitan ini Komite sekolah lebih efektif dan dapat membantu kinerja manajerial sekolah. Hal ini perlu dilakukan agar sekolah khususnya Pondok Pesantren Pancasila dapat terbantu dan Komite sekolah dapat melaksanakan amanahnya sebagai wadah masyarakat dalam membantu pesantren.

Kehadiran komite sekolah adalah wujud dan upaya semakin dekatnya sekolah dengan masyarakat penggunaannya, memungkinkan bagi keduanya secara bersama-sama melakukan telaah terhadap kebutuhan sekolah, dan masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam mendukung berbagai program pesantren, masyarakat yang ada pada umumnya adalah orang tua peserta didik.

6. Hubungan antara Komite Sekolah dan Manajemen Masyarakat

Tanpa bantuan dari masyarakat, suatu lembaga pendidikan tidak dapat berfungsi dengan baik dan tanpa adanya program yang baik maka suatu lembaga pendidikan akan gagal mencapai tujuannya. Karena itu, Lembaga pendidikan perlu memberikan informasi pada masyarakat tentang lembaga tersebut.

Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memperoleh gambaran yang tepat tentang sekolah. Program antara hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat hendaknya disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan secara terus menerus. Yang mencakup aspek kegiatan di dalam lembaga

¹²Departemen Agama. Al-Qur an Al-Kariim Jakarta: CV Al-Hanan. 2009 hal.341

¹³Departemen Agama. Al-Qur an Al-Kariim. Jakarta: CV Al-Hanan. 2009 hal.543

¹⁴Mawardi Lubis, Disertasi. jakarta UNJ: 2013. Hal: 53

¹⁵Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: Cipta Press, 2005) h.177.

¹⁶Oemar Hamalik. Evaluasi Kurikulum, Cet. ke -1., (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990), h. 33

pendidikan secara keseluruhan.¹⁷

Peningkatan Mutu Pendidikan 1. Pengertian Mutu

Pengertian mutu mengandung makna yang beragam. Namun perlu ada satu pengertian yang operasional sebagai suatu pedoman dalam pengelolaan pendidikan untuk sampai pada pengertian mutu pendidikan, kita lihat terlebih dahulu pengertian mutu pendidikan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, keadaan, taraf atau derajat (kependaian, kecerdasan, dan sebagainya).¹⁸

Menurut Oemar Hamalik, pengertian mutu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu segi normatif dan segi deskriptif. Dalam artian normatif, mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan (kriteria) intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik, mutu pendidikan merupakan produk pendidikan yakni manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Berdasarkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik, tenaga kerja yang terlatih. Dalam artian deskriptif, mutu ditentukan berdasarkan keadaan hasil tes prestasi belajar.¹⁹

a. Pengertian Pendidikan

Ditinjau dari sudut hukum, definisi pendidikan berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 th 2003 tentang Sisdiknas, Pasal 1 ayat 1. Yaitu: "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."²⁰

Jadi, mutu pendidikan itu adalah berupa hasil atau output yang dihasilkan oleh suatu lembaga untuk menarik simpati atau minat pelanggan yang dalam hal ini adalah Lembaga Pendidikan. Korelasi mutu dengan pendidikan, sebagaimana pengertian yang dikemukakan oleh Dzaujak Ahmad mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara profesional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.²¹

¹⁷Blogspot.com. di download hari 10 Mei 2017. Pkl. 14.45

¹⁸Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa, Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 10, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 1990) h. 33

¹⁹Oemar Hamalik, Evaluasi kurikulum, cet ke 1., (Bandung: Remaja Rosda karya, 1990.)

²⁰Prof. Dr. Husaini Usman, M.Pd. Manajemen, Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan. (Jakarta: Bumi Aksara. 2010), hal. 11

²¹Dzaujak Ahmad, Penunjuk peningkatan mutu pendidikan disekolah dasar, (Jakarta: Depdikbud 1996), h. 8

PEMBAHASAN

1. Pondok Pesantren

a. Pengertian Pesantren

Dari segi bahasa pesantren adalah pondok pesantren atau sering disingkat Pon-Pes, istilah pondok berasal dari pengertian asrama-asrama para santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang terbuat dari bambu, atau berasal dari bahasa arab yaitu pundug, yang berarti hotel atau asrama. Dimana para santri semuanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiyai.

Sedangkan menurut C.C Berg kata pesantren berasal dari bahasa india yaitu shastri, kata shastri berasal dari kata sastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama, atau ilmu tentang pengetahuan. Dari asal-usul kata santri pula banyak sarjana berpendapat bahwa lembaga pesantren pada dasarnya adalah lembaga pendidikan keagamaan bangsa Indonesia pada masa menganut agama hindu dan budha yang bernama mandala yang diislamkan oleh para kiyai.

Dan Abdul Rahman menegaskan bahwa secara teknis pesantren adalah tempat belajar dan tinggalnya para santri.²²

b. Komponen-Komponen Pesantren

1. Pondok (Asrama)
2. Masjid
3. Pengajaran Kitab Klasik
4. Kiyai
5. Santri

c. Latar Belakang berdirinya Pesantren dan sejarah Pesantren

Pesantren merupakan salahsatu dari model pendidikan berbasis masyarakat. Kebanyakan pesantren berdiri atas inisiatif masyarakat muslim yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik generasi muda agar memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran islam dengan baik. Pesantren dengan cara hidupnya yang bersifat kolektif barangkali merupakan perwajahan atau cerminan dari semangat dan tradisi dan lembaga gotong royong yang umum terdapat dipedesaan.²³

Nilai-nilai keagamaan seperti ukhuwah (persaudaraan), ta'wun (kerja sama), jihad (berjuang), ta'at, sederhana, mandiri, ikhlas dan berbagai nilai eksplisit dari ajaran islam lain yang mentradisi dipesantren ikut mendukung kelestariannya.

Sedangkan saat ini mengalami perubahan dengan bangunan yang lebih bagus dari sebelumnya. Model sikap keberagaman para santri saat itu masih mengandalkan model taqlid, konsep ini menjadi wujud sikap

²²Abdurrahman Mas'ud, dkk, Dinamika Pesantren dan Madrasah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2002), hal.10, pengertian pesantren. Rabu, 31 mei

²³Mustofa Syarif, Administrasi Pesantren, (Jakarta : PT. Paryu Barkah, t.t.), hal.6.



religius para santri yang taat. Metode pembelajarannya pada saat itu ialah pada siang hari para santri dibawa kelahan pertanian, sementara pada malam harinya para santri belajar tentang dasar khusus al-Quran dan As-Sunnah.

2. Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Prakemerdekaan hingga Abad Ke-21

Satu abad setelah masa Walisongo, abad 17. Pengaruh Walisongo diperkuat oleh Sultan Agung yang memerintah Mataram dari tahun 1613-1645. Sultan Agung merupakan penguasa terbesar di Jawa, yang juga terkenal sebagai Sultan Abdurrahman dan Khali-fatullah Sayyidin Panotogomo ing Tanah Jawi, yang berarti Khalifatullah pemimpin dan penegak agama di tanah Jawa. Dia memproklamirkan kalender Islam di Jawa. Dengan system kalender baru ini, nama-nama bulan dan hari Hijriyyah seperti Muharram dan Ahad dengan mudah menjadi ucapan sehari-hari lisan Jawa.

Pada masa awal-awal kemerdekaan kalangan santri turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. K.H. Hasyim Asy'ari pada waktu itu mengeluarkan fatwa, wajib hukumnya mempertahankan kemerdekaan. Fatwa tersebut disambut positif oleh umat Islam sehingga membuat arek-arek Surabaya dengan Bung Tomo sebagai komando, dengan semboyan "Allahhu Akbar!! Merdeka atau mati" tidak gentar menghadapi Inggris dengan segala persenjataannya pada tanggal 10 November. Diperkirakan sepuluh ribu orang tewas pada waktu itu. Namun hasilnya, Inggris gagal menduduki Surabaya.

Setelah perang kemerdekaan, pesantren mengalami ujian kembali dikarenakan pemerintahan sekuler Soekarno melakukan penyeragaman atau pemusatan pendidikan nasional yang tentu saja masih menganut sistem barat ala Snouck Hurgronje. Akibatnya pengaruh pesantren pun mulai menurun, jumlah pesantren berkurang, hanya pesantren besar yang mampu bertahan. Hal ini dikarenakan pemerintah mengembangkan sekolah umum sebanyak-banyaknya. Berbeda pada masa Belanda yang terkhusus untuk kalangan tertentu saja dan disamping itu jabatan-jabatan dalam administrasi modern hanya terbuka luas bagi orang-orang bersekolah di sekolah tersebut.

Populasi pondok pesantren ini semakin bertambah dari tahun ke tahun, baik pondok pesantren tipe salafiyah maupun khalafiyah yang kini tersebar di penjuru tanah air. Pesatnya pertumbuhan pesantren ini seakan-akan mendorong pemerintah untuk melembagakannya secara khusus. Sehingga keluarlah surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 1975 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen agama yang kemudian di-ubah dan disempurnakan dengan keputusan Menteri

Agama RI nomor 1 tahun 2001.

Kondisi pondok pesantren yang demikian akhirnya merespons oleh pemerintah. Sehingga lahir kesepakatan bersama antara departemen Agama dan departemen Pendidikan dengan nomor 1/U/KB/2000 dan MA/86/2000 tentang pedoman pelaksanaan pondok pesantren salafiyah sebagai pola pendidikan dasar. Secara eksplisit, untuk operasionalnya, setahun kemudian keluar surat keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam, nomor E/239/2001 tentang panduan teknis penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar pada pondok pesantren salafiyah. Lahirnya UU nomor 02 tahun 1989, yang disempurnakan menjadi UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 30 ayat 1 sampai ayat 4 disebutkan pendidikan keagamaan, pondok pesantren termasuk bagian dari sistem pendidikan nasional.

d. Ciri-ciri Umum Pesantren

Ciri umum pesantren memiliki kultur khas yang berbeda dengan budaya sekitarnya. Beberapa peneliti menyebut sebagai sebuah sub kultur yang bersifat indioskratic. Cara pengajarannya pun unik sang kiai yang biasanya adalah pendiri sekaligus pemilik pesantren, membacakan manuskrip-manuskrip keagamaan klasik berbahasa arab (kitab kuning). Sementara para santri mendengarkan sambil memberi catatan (Ngesahi, Jawa).

Pada era otonomi daerah sekarang ini, keberadaan pesantren kembali menemukan momentum relevansinya yang cukup besar untuk memainkan kiprahnya sebagai elemen penting dalam proses pembangunan sosial.

Dari waktu ke waktu fungsi pesantren berjalan secara dinamis, berubah dan berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat global. Betapa tidak, pada awalnya lembaga tradisional ini mengembangkan fungsi sebagai lembaga sosial dan penyiaran agama (Horikoshi, 1987:232). Sementara, Azyumardi Azra (dalam Nata, 2001:112) menawarkan adanya tiga fungsi pesantren, yaitu:

- (1) transmisi dan transfer ilmu-ilmu Islam
- (2) pemeliharaan tradisi Islam
- (3) ulama.

3. Riwayat Singkat Berdirinya Pondok Pesantren Pancasila

Pondok ini bernama Pondok Pesantren Pancasila Bengkulu. Nama tersebut diberikan oleh Presiden RI Bapak Soeharto pada saat peresmian MTs Pancasila pada tanggal 18 November 1974 yang diwakili oleh Menteri Agama RI Bapak Prof. Dr. H. Mukti Ali, MA.

Modal awal pembangunan ini berasal dari masyarakat kelurahan jembatan kecil yang ketika itu

bernama pasar jembatan kecil berupa tanah wakaf seluas 9 Ha (sekarang tinggal 6 Ha) dan uang ban-tuan dari presiden RI Bapak Soeharto sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada pemda provinsi (Bapak Gubernur H.Ali Amin, SH) pada waktu kunjungan beliau ke Beng-kulu tahun 1972.

MTs Pancasila Bengkulu yang luasnya 6 Ha ini terletak di tempat yang strategis, karena perkembangan kota Bengkulu, yang sejak berdirinya beralamat di Jl. Rinjani Kelurahan jembatan kecil kecamatan Cempaka kota Bengkulu, kemudian karena pemekaran kecamatan dalam kota Bengkulu sekarang berada dalam wilayah kecamatan Singgaran Pati kota Bengkulu dengan nomor Telpn 0736-20262.

Dengan Visi, “ Menjadi Pusat Pembinaan Akidah, Ibadah Dan Akhlakul Kharimah”. Terwujudnya sekolah yang unggul dalam MTQ dan IPTEK. Dan misi, “Mencerdaskan Putra-Putri Muslim Melalui Tafaqquh Fiddin (Pendalaman Ilmu Keagamaan)”.

a. Sejarah berdirinya SMP Berbasis Pesantren (BP) SMP berbasis pesantren berdiri pada tahun 1988, latar belakang berdirinya SMP berbasis pesantren ini atas dasar usulan masyarakat dan pihak sekolah untuk mendirikan jenjang pendidikan sekolah setingkat MTs yang berbasis pesantren. Guna untuk memadukan pembelajaran umum dengan pembelajaran pondok sehingga santri siap menjawab tantangan yang dihadapinya di masa mendatang. SMP berbasis pesantren Pancasila Bengkulu terletak di tengah kota Bengkulu yang merupakan tempat yang sangat strategis di Jl. Rinjani Kelurahan jembatan kecil kecamatan Cempaka kota Bengkulu, kemudian karena pemekaran kecamatan dalam kota Bengkulu sekarang berada dalam wilayah kecamatan Singgaran Pati kota Bengkulu.

4. Peran Komite sekolah dalam membuat kebijakan dan peningkatan Mutu Pendidikan di SMPBP Pancasila Kota Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kepala sekolah SMP Berbasis Pesantren Pondok Pesantren Pancasila Kota Bengkulu di atas disarankan, maka yang harus dilaksanakan kegiatan komite adalah sebagai berikut:

1. Membantu pengadaan dana, sarana dan prasarana serta bantuan lainnya yang diperlukan sekolah.
2. Memelihara hubungan dan kerja sama antara orang tua dan warga sekolah.
3. Penempatan dana dan bantuan lainnya dari orang tua siswa dan masyarakat secara tepat sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi kesimpulan adalah :

1. Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah Mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di SMP BP Pondok Pesantren Pancasila kota Bengkulu, Meningkatkan tanggung jawab atau peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Menciptakan suasana kondusif, transparan, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu. Yaitu sebagai pemberi pertimbangan, pemikiran, pendukung, pengontrol maupun tenaga dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, baik yang berwujud finansial dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.
2. Korelasi tugas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah koordinasi saling kerja sama dan komunikasi dilakukan sangat membantu tugas dan tujuan yang telah diprogramkan komite sekolah. Sebuah organisasi harus melaksanakan aktivitasnya dengan keterbukaan dan terkoordinir tukar informasi melibatkan hubungan timbal balik antara sekolah dan komite sekolah.
3. Tantangan dan hambatan yang dihadapi komite sekolah. Semua yang diprogramkan sekolah komite belum dilibatkan dalam segala hal yang menyangkut dengan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur an Al-Kariim. Jakarta: CV Al-Hanan. 2009)
- Dzaujak Ahmad ,Penunjuk peningkatan mutu pendidikan disekolah dasar ,(Jakarta: Depdikbud 1996)
- Hubberman dan Miles, Analisis Data Kualitatif, (Universitas Indonesia : UI Press,1992)
- lampiran surat keputusan (sk) pimpinan pondok pesantren Pancasila Bengkulu tentang susunan pengurus komite pondok pesantren Pancasila Bengkulu tahun 2006
- Lisdiah MF, dalam disertasi Mawardi Lubis .Efektivitas Kinerja komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan., edukasi vol. VII (2) (Jakarta 2009), hal.50.
- Lexy .Z.Moleong, Metodologi penelitian kualitatif (Bandung: Remaja Rosda karya,2000)
- Linclon, Y Vonna s. And Egon Guba, naturalistic Inquiry(California: Sage Publications, 1985)
- Mawardi Lubis. Disertasi (Pengaruh gaya kepemimpinan kepala sekolah ,partisipasi komite sekolah, solidaritas guru terhadap efektivitas pengelolaan sekolah SD Negeri Sekota Bengkulu) (Jakarta,



- UNJ : 2013)
- Mulyono. Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan.(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.2008)
- Oemar Hamalik.Evaluasi Kurikulum, Cet.ke - 1.,(Bandung : Remaja Rosda Karya,1990),h. 33
- Permendikbud Republik Indonesia .Undang-undang sisidiknas. Yogyakarta. Buku Biru.(2013)
- Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa,Depdikbud ,Kamus Besar Bahasa Indone-sia.cet.10.,(Jakarta: Remaja Rosda Karya,1990)
- Suryo Subroto. B, Manajemen Pendidikan Disekolah . (Jakarta . Rineka cipta : 2004)
- Syafaruddin, Manajemen Lembaga PendidikanIslam (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Syaiful Sagala. Administrasi Pendidikan Kontemporer (Bandung. Alfabeta :2009)
- Syaiful Sagala.Manajemen berbasis Sekolah dan Masyarakat,Strategi Memenangkan Persaingan Mutu (Jakarta : Rakasta Samasta)
- TILAAR, H. A. R. Beberapa Agenda Reformasi pendidikan Nasional. dalam perspektif Abad 21 (Mangelang : Tera Indonesia, 1999)
- Usman Husaini, Manajemen, Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan. (Jakarta. Bumi Aksara : 2010)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab II, Pasal 3.
- Walidin Warul A .Pencerahan Jurnal Pendidikan .Majlis Pendidikan daerah Nanggroe Aceh Darus-salam (Banda Aceh 2004)

